

Daftar Isi

Halaman Judul	i
Halaman Pengesahan	ii
Pernyataan Keaslian Karya Tulis Tesis	iii
Halaman Persembahan	iv
Kata Pengantar	v
Daftar Isi	vii
Daftar Tabel	ix
Daftar Gambar	x
Intisari	xi
<i>Abstract</i>	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Pertanyaan Penelitian	10
1.4 Tujuan Penelitian	10
1.5 Manfaat Penelitian	10
1.6 Sistematika Penulisan	11
BAB II LANDASAN TEORI DAN TINJAUAN PUSTAKA	12
2.1 Landasan Teori	12
2.1.1 Evaluasi dampak	12
2.1.2 Pemekaran daerah	16
2.1.3 Desentralisasi fiskal	18
2.1.4 Desentralisasi pendidikan	20
2.1.5 Alokasi pengeluaran pendidikan	25
2.1.6 Hasil pendidikan	26
2.2 Tinjauan Pustaka	28
2.3 Hipotesis Penelitian	33
2.4 Kerangka Penelitian	33
BAB III METODE PENELITIAN	34
3.1 Desain Penelitian	34
3.2 Metode Pengumpulan Data	34

3.3 Lingkup Penelitian	35
3.4 Metode Analisis Data	36
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	41
4.1 Gambaran Umum Alokasi Pengeluaran Pendidikan Kabupaten/Kota di Indonesia Sebelum dan Setelah Pemekaran Provinsi	41
4.1.1 Pemekaran Provinsi Maluku menjadi Provinsi Maluku Utara	42
4.1.2 Pemekaran Provinsi Jawa Barat menjadi Provinsi Banten	43
4.1.3 Pemekaran Provinsi Sumatera Selatan menjadi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	44
4.1.4 Pemekaran Provinsi Sulawesi Utara menjadi Provinsi Gorontalo	45
4.1.5 Pemekaran Provinsi Papua menjadi Provinsi Papua Barat	46
4.1.6 Pemekaran Provinsi Riau menjadi Provinsi Kepulauan Riau	47
4.1.7 Pemekaran Provinsi Sulawesi Selatan menjadi Provinsi Sulawesi Barat	48
4.1.8 Pemekaran Provinsi Kalimantan Timur menjadi Provinsi Kalimantan Utara	49
4.2 Deskripsi Data	50
4.3 Hubungan Variabel Penjelas dengan Alokasi Pengeluaran Pendidikan dan Hasil Pendidikan	53
4.4 Estimasi <i>Difference-in-Differences</i> (DID) mengenai Dampak Pemekaran Provinsi terhadap Alokasi Pengeluaran Pendidikan Kabupaten/Kota	59
4.5 Estimasi <i>Difference-in-Differences</i> (DID) mengenai Dampak Pemekaran Provinsi terhadap Hasil Pendidikan Kabupaten/Kota	60
4.6 Pembahasan	64
BAB V SIMPULAN	68
5.1 Simpulan	68
5.2 Implikasi Kebijakan	69
5.3 Keterbatasan Penelitian	69
5.4 Saran	70
Daftar Pustaka	71
Lampiran	76

Daftar Tabel

2.1	Pendekatan evaluasi kebijakan deskriptif	13
2.2	Desentralisasi tanggung jawab antara pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota	23
3.1	Metode <i>Difference-in-Differences</i>	37
3.2	Ilustrasi estimator <i>Difference-in-Differences</i>	38
4.1	Sampel kabupaten/kota dalam penelitian	50
4.2	Ringkasan statistik deskriptif data penelitian	51
4.3	Hasil regresi daerah mekar dan tidak mekar dengan memperhitungkan variabel penjelas kabupaten/kota	54
4.4	Evaluasi dampak pemekaran provinsi terhadap alokasi pengeluaran pendidikan kabupaten/kota dengan DID.....	60
4.5	Evaluasi dampak pemekaran provinsi terhadap rata-rata lama sekolah kabupaten/kota dengan DID	60
4.6	Evaluasi dampak pemekaran provinsi terhadap angka melek huruf kabupaten/kota dengan DID	61
4.7	Evaluasi dampak pemekaran provinsi terhadap angka partisipasi sekolah SD kabupaten/kota dengan DID	62
4.8	Evaluasi dampak pemekaran provinsi terhadap angka partisipasi sekolah SMP kabupaten/kota dengan DID	63
4.9	Evaluasi dampak pemekaran provinsi terhadap angka partisipasi sekolah SMA kabupaten/kota dengan DID	64

Daftar Gambar

1.1	Perbandingan jumlah daerah otonom sebelum otonomi daerah tahun 1999 dengan setelah otonomi daerah tahun 1999.....	3
2.1	Rantai hasil evaluasi dampak.....	15
2.2	Kerangka penelitian	33
3.1	<i>Difference-in-Differences</i>	36
4.1	Alokasi pengeluaran pendidikan sebelum dan setelah pemekaran provinsi	41
4.2	Alokasi pengeluaran pendidikan dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) sebelum dan setelah pemekaran Provinsi Maluku menjadi Provinsi Maluku Utara	42
4.3	Alokasi pengeluaran pendidikan dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) sebelum dan setelah pemekaran Provinsi Jawa Barat menjadi Provinsi Banten	43
4.4	Alokasi pengeluaran pendidikan dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) sebelum dan setelah pemekaran Provinsi Sumatera Selatan menjadi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	44
4.5	Alokasi pengeluaran pendidikan dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) sebelum dan setelah pemekaran Provinsi Sulawesi Utara menjadi Provinsi Gorontalo	45
4.6	Alokasi pengeluaran pendidikan dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) sebelum dan setelah pemekaran Provinsi Papua menjadi Provinsi Papua Barat	46
4.7	Alokasi pengeluaran pendidikan dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) sebelum dan setelah pemekaran Provinsi Riau menjadi Provinsi Kepulauan Riau	47
4.8	Alokasi pengeluaran pendidikan dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) sebelum dan setelah pemekaran Provinsi Sulawesi Selatan menjadi Provinsi Sulawesi Barat	48
4.9	Alokasi pengeluaran pendidikan dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) sebelum dan setelah pemekaran Provinsi Kalimantan Timur menjadi Provinsi Kalimantan Utara	49